

REMBUG ANGGARAN DALAM PERENCANAAN PENGANGGARAN

DAERAH: GABUS UTAWI SAE-SAEN

(Studi Kasus dalam Penganggaran Daerah di Pemerintah Kabupaten Boyolali)

NASKAH PUBLIKASI



Disusun oleh:

EKO SUWARYONO

B 200100064

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul
: **“REMBUG ANGGARAN DALAM PERENCANAAN PENGANGGARAN
DAERAH: GABUS UTAWI SAE-SAEN (Studi Kasus dalam Penganggaran
Daerah di Pemerintah Kabupaten Boyolali)”**

Yang ditulis oleh :

Nama : EKO SUWARYONO

NIM : B 200 100 064

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 12 Oktober 2014

Pembimbing



(Drs. Suyatmin, M.Si)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, M.Si)

**REMBUG ANGGARAN DALAM PERENCANAAN PENGANGGARAN
DAERAH: GABUS UTAWI SAE-SAEN**

**(Studi Kasus dalam Penganggaran Daerah di Pemerintah Kabupaten
Boyolali)**

EKO SUWARYONO

B 200 100 064

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail : Swaryonoeko@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan pembangunan yang dilihat dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan, forum SKPD, dan musrenbang kabupaten di Pemerintah kabupaten Boyolali.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah para aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat yang terlibat langsung dan mempunyai pengalaman dalam proses musrenbang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Sanders(1982) yaitu a). Deskripsi fenomena, b). Identifikasi tema-tema, c). Mengembangkan noetic/noematic, d). Abstraksi intisari.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbang di Pemerintah Kabupaten Boyolali secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah di Kabupaten Boyolali. Hanya rembug anggaran karena rendahnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga hanya masyarakat tertentu yang dapat mengetahui informasi dan mengusulkan program dan ketika mekanisme musrenbang selesai maka langkah penyusunan APBD selanjutnya lebih mendominasi masalah politik.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Penganggaran Daerah, Proses Penganggaran Pemerintah Daerah, Musrenbang, Fenomenologi

A. Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya bersumber dari uang rakyat. Karenanya, kepentingan rakyat haruslah menjadi prioritas utama dalam penganggarannya dan tentunya bukan untuk kepentingan elit. Dengan demikian maka pembangunan sebagai *continuously process* akan dapat berjalan dengan baik serta manfaat pembangunan betul-betul dapat dirasakan masyarakat, jika proses dan hasil-hasil Musrenbang dilakukan secara benar dan direalisasikan dengan benar pula dalam APBD (Salman, 2008).

Salah satu bentuk partisipasi dalam perencanaan penganggaran adalah menghadiri Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau dikenal dengan istilah Musrenbang. Musrenbang dalam penyusunan APBD dilaksanakan melalui mekanisme dan tahapan secara berjenjang yang diawali dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Musrenbang diharapkan menjadi wadah dalam menetapkan prioritas pembangunan sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat tercapai melalui pembangunan (Sopannah, 2012).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penganggaran daerah. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Sopannah (2012). Penelitian ini berjudul **REMBUG ANGGARAN Dalam Perencanaan Penganggaran Daerah (Studi Kasus dalam Penganggaran Daerah di Pemerintah Kabupaten**

Boyolali). Proses perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu realitas sosial dimana terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan mulai dari eksekutif, legislatif dan juga masyarakat. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi pemahaman atas fenomena penganggaran daerah dengan berfokus pada partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

B. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan pembangunan yang dilihat dari Musrenbang Desa di Kabupaten Boyolali.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan pembangunan yang dilihat dari Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Boyolali.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan pembangunan yang dilihat dari Forum SKPD di Kabupaten Boyolali.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan pembangunan yang dilihat dari Musrenbang Kabupaten di Kabupaten Boyolali.

C. Tinjauan pustaka

1. Rembug dan Anggaran

Rembug yang artinya omong-omong. Dalam pedusunan dikenal dengan istilah rembug desa yaitu musyawarah yang diikuti seluruh warga desa. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit

(satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu dimasa mendatang.

2. Perencanaan pembangunan daerah

Menurut Lubis (2009), Perencanaan adalah suatu proses atau kegiatan dalam rangka menyusun rencana kegiatan. Rencana adalah segala sesuatu yang belum dilakukan tetapi diharapkan dapat dilakukan maka perencanaan partisipatif adalah suatu proses untuk menghasilkan rencana yang dilakukan oleh semua pihak terkait dalam suatu bidang dan pihak-pihak merencanakan secara bersama-sama (partisipatif) dan terbuka.

3. Penganggaran Daerah

Anggaran merupakan sebuah instrumen pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Kebijakan suatu pemerintah membutuhkan sumber daya berupa alokasi anggaran yang tertuang dalam APBD. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Salman, 2008).

4. Partisipasi dan Derajat Partisipasi Masyarakat

Dalam dua dasawarsa terakhir istilah partisipasi menjadi satu istilah yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemikiran dasar perlunya partisipasi masyarakat menurut Mahardika (2001) adalah, bahwa

proyek pembangunan akan mengalami ancaman kegagalan jika tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan implementasinya.

5. Perencanaan Sebagai Acuan Bagi Penganggaran

Perencanaan pembangunan dan penganggaran merupakan dua hal yang saling terkait dan harus seimbang. Sebagai alat manajemen, maka perencanaan harus mampu menjadi panduan strategis dalam mewujudkan tujuan yang akan di capai.

6. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Istilah Musrenbang tidak asing lagi bagi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi bahkan para pejabat publik baik eksekutif maupun legislatif. Musrenbang adalah forum bagi masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi dengan pola *bottom up*.

D. Metode penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Mengacu pada tematik penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

2. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Boyolali. Obyek analisis pada penelitian ini partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbang Tahun 2014 yang di dalamnya terjadi interaksi antara individu dan struktur.

3. Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti (Milmanyusdi, 2009). Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah para aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat yang terlibat langsung dan mempunyai pengalaman dalam proses Musrenbang. Identitas informan yang digunakan hanya inisial untuk menggantikan nama informan yang sebenarnya.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh melalui pengamatan berpartisipasi, wawancara mendalam dengan para informan, dan dokumentasi.

5. Definisi Konsep

Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003).

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, proses analisis data dapat dilakukan oleh peneliti pada saat maupun setelah pengumpulan data. Menurut Wina Sanjaya (2009: 106), analisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterpretasikan data dengan tujuan untuk mendudukkan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya sehingga memiliki makna.

Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang mengacu kepada Sanders (1982) dalam Rahayu dkk. (2007) analisis data dalam penelitian fenomenologi, yaitu: (1). Deskripsi fenomena, (2). Identifikasi tema-tema, (3). Mengembangkan *noetic/noematic correlates* dan (4). Abstraksi intisari atau universals dari *noetic/noematic correlates*.

E. Hasil dan pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dalam forum perencanaan pembangunan daerah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hasil wawancara mendalam dengan informan menunjukkan hasil bahwa fenomena partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbang di Pemerintah Kabupaten Boyolali secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah di Kabupaten Boyolali. Berbagai tahapan mulai Musrenbang Desa, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten secara rembug dan diskusi dilakukan (*rembug anggaran*).

1. Musrenbang desa

Setelah adanya PERDA Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah, musrenbang Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali sekarang lebih partisipatif dengan ditandai banyaknya masyarakat yang hadir dalam Musrenbang Desa. Hal ini adalah pernyataan Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali:

“Sebetulnya terkait dengan musrenbang itu kan merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah. Masyarakat sekarang ini lebih partisipatif dalam proses penyusunan APBD di kabupaten Boyolali setelah adanya Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah. Jadi pemerintah daerah secara normatif telah melaksanakan terkait dengan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Dan kegiatan itu sudah disesuaikan dengan mekanisme yang sudah ada karena usulan-usulan dari desa itu sebagai bahan musrenbang di tingkat kecamatan kemudian pembahasan di tingkat kecamatan pun usulan-usulan dari desa itu sudah dibuat semacam skala prioritas berdasarkan ketertarikan di masing-masing wilayah kemudian hasil dari musrenbang di tingkat kecamatan itu kan menjadi eh daftar urutan usulan dari tingkat kecamatan kemudian usulan itu dibawa ke tingkat kabupaten dimana di kecamatan juga ada perwakilan dari masing-masing unsur di tingkat kecamatan ada unsur pemerintahan, unsur masyarakat, dan sebagainya. Dan ketika di kabupaten Boyolali itu pun juga sudah dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam PERDA tersebut, kemudian ketika sampai di tingkat kabupaten itu menjadi usulan di tingkat propinsi. Jadi, itu merupakan suatu skala prioritas tingkat kabupaten dan kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat kabupaten merupakan usulan dari kecamatan itu semua sudah terakumulasi walaupun ada sebagian yang belum itu kan disesuaikan dengan kemampuan penyelenggara juga” (S, 22 September 2014).

Mekanisme Musrenbang memang dilakukan untuk memenuhi aturan undang-undang telah ditetapkan seperti yang terjadi di wilayah Probolinggo. Tidak jauh berbeda dengan mekanisme yang terjadi di wilayah lain, di Kabupaten Boyolali juga demikian. Perbedaan yang muncul di masyarakat

Boyolali adalah, mereka melakukan mekanisme partisipasi Forabi (Forum Rakyat Boyolali). Partispasi Forabi tersebut di lakukan pada puncak musrenbang atau musrenbangkab. Forabi merupakan sebuah forum yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat untuk bisa *berembug* dan berdiskusi mencari jalan keluar untuk permasalahan di Boyolali.

2. Musrenbang Kecamatan (Musrenbangcam)

Berdasarkan jadwal dan agenda yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Musrenbangcam adalah dua hari, di hari pertama yaitu acara seremonial dan penyampaian usulan program dan kegiatan masing-masing desa. Kemudian di hari ke dua yaitu difokuskan kepada diskusi untuk membahas prioritas program dan sesuai dengan kelompok bidang sarana dan prasarana, bidang sosial dan budaya, dan bidang ekonomi. Pelaksanaan musrenbangcam tetap dilaksanakan selama dua hari meskipun ada sebagian daripeserta yang menginginkan pelaksanaan musrenbang yang tadinya dua hari disingkat menjadi satu hari karena dengan alasan lebih efisien dan efektif. Hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa peserta musrenbangcam sebagai berikut.

“Musrenbang kecamatan dilakukan selama dua hari harus sesuai jadwal dan agendanya, namun ada bebrapa peserta yang menginginkan pelaksanaan musrenbang disingkat menjadi satu hari dengan alasan agar lebih efisien dan efektif dalam penyelenggaraannya”(R, 28 September 2014) .

“Menurut saya juga setuju ketika para peserta menginginkan pelaksanaan musrenbangcam yang tadinya dilaksanakan dua hari disingkat menjadi satu hari yang penting hasilnya bagus tetapi pelaksanaan musrenbangcam tetap dilaksanakan selama dua hari karena dari pihak pemerintah sudah menjadwalkannya dan mau tidak

mau harus dilaksanakan karena itu merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah”(R, 28 September 2014).

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam proses Musrenbang kecamatan dan juga hasil dari wawancara dengan berbagai peserta menunjukkan fakta bahwa penyelenggaraan musrenbang kecamatan terkesan hanya sekedar “formalitas” untuk memenuhi mekanisme perencanaan pembangunan. Hal yang sama seperti di daerah lain di Indonesia seperti di Kabupaten Probolinggo dan kota Bekasi dan proses pelaksanaan musrenbangcam dilakukan selama 2 (dua) hari disingkat menjadi 1(satu) hari. Dalam proses pelaksanaannya partisipasi masih di dominasi kalangan elit tertentu, partisipasi dimobilisasi oleh kelompok kepentingan tertentu, partisipasi yang di dikemas dalam acara *intertainment* tertentu.

3. Forum Sinkronisasi Kecamatan dan SKPD

Dalam forum SKPD keterlibatan masyarakat **sangat dibatasi** karena tidak ada delegasi atau undangan formal untuk masyarakat. Peserta di dominasi dari unsur pemerintah dan birokrat. Tugas Tim Penyelenggara Forum (TPF) SKPD cukup berat karena harus mengkompilasi daftar usulan kegiatan dari seluruh kecamatan dan dari usulan Renja Kecamatan. Selain itu, TPF SKPD harus memperkirakan setiap biaya yang diusulkan. Tugas ini membutuhkan waktu yang lama dan kemampuan teknis yang memadai.

4. Musrenbang Kabupaten (Musrenbangkab)

Penyelenggaraan musrenbangkab di bawah tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Tim Penyelenggara Musrenbangkab disusun berdasarkan SK Bupati yang didominasi oleh unsur pejabat. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang dibatasi melalui sistem delegasi. Berikut kutipan wawancara dengan peserta dari Bappeda dan Masyarakat Musrenbangkab Boyolali.

*“Saya setuju bahwasanya program musrenbang atau mekanismenya ini sudah diatur dalam UU dan perwujudan sebagai partisipasi dalam penyusunan APBD ini hanyalah **formalitas** saja dan banyak kelemahan dalam implementasinya terkait siapa saja yang terlibat dalam musrenbang itu. Setelah musrenbang selesai maka ada tahap berikutnya itu adalah mendengarkan antara eksekutif dan legislatif dimana masyarakat sudah terputus keterlibatan sebagai partisipatif. Tahap ini usulan dari masyarakat tidak ada yang mengawal, nah kemungkinan besar usulan dari masyarakat itu terhapus karena tahap ini proses politik itu yang lebih mendominasi”(D, 19 Maret 2014).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap terakhir yaitu Musrenbang Kabupaten Boyolali dalam proses perencanaan pembangunan telah diselenggarakan oleh Bappeda sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku. Dilihat dari hasil wawancara ada penyimpangan yang dinyatakan oleh masyarakat yaitu program musrenbang atau mekanismenya sudah diatur dalam UU dan perwujudan sebagai partisipasi dalam penyusunan APBD ini hanyalah **formalitas** saja dan banyak kelemahan dalam implementasinya terkait siapa saja yang terlibat dalam musrenbang tersebut. Selain mekanisme Musrenbang,

terdapat mekanisme jaring asmara yang dilakukan oleh DPRD untuk menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang diharapkan dapat meminimalisasi proses perencanaan penganggaran atau Musrenbang yang terkesan hanya sekedar **formalitas**.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pelaksanaan Musrenbang di Pemerintah Kabupaten Boyolali secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah di Kabupaten Boyolali. Setelah adanya PERDA Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah, musrenbang Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali sekarang lebih partisipatif dengan di tandai banyaknya masyarakat yang hadir dalam Musrenbang Desa. Musrenbang Desa, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten secara rembug dan diskusi dilakukan (*rembug anggaran*). Sedangkan jika dikaitkan dengan makna dan hakikat partisipasi sesungguhnya mekanisme partisipasi yang ada masih sebatas formalitas dan partisipasi masyarakat masih dianggap “*gabug utawi saesaen*”. Tidak jauh berbeda dengan mekanisme yang terjadi di wilayah lain, di Kabupaten Boyolali juga demikian. Perbedaan yang muncul di masyarakat Boyolali adalah, mereka melakukan mekanisme partisipasi Forabi (Forum Rakyat Boyolali). Forabi merupakan sebuah forum yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat untuk bisa *berembug* dan berdiskusi mencari jalan keluar untuk permasalahan di Boyolali. Pelaksanaan musrenbangcam menunjukkan fakta bahwa penyelenggaraan musrenbang kecamatan terkesan hanya sekedar “formalitas” untuk memenuhi mekanisme perencanaan pembangunan. Dalam proses pelaksanaannya partisipasi masih di dominasi kalangan elit tertentu. Tidak adanya perwakilan masyarakat dalam forum SKPD menyebabkan tidak

adanya pengawalan usulan masyarakat yang telah diusulkan dalam Musrenbangdes dan Musrenbangcam. Di tingkat puncak musrenbang atau musrenbangkab, dalam penyusunan APBD ini hanyalah **formalitas** saja dan banyak kelemahan dalam implementasinya terkait siapa saja yang terlibat dalam musrenbang tersebut.

B. Saran

Implikasi terkait dengan hasil penelitian ini adalah.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi tentang Musrenbangdes kepada masyarakat sehingga kualitas Musrenbang semakin baik.
2. Bagi Masyarakat Boyolali diharapkan semakin pro aktif untuk terlibat dalam proses perencanaan, implementasi, dan pertanggungjawaban pembangunan di Kabupaten Probolinggo.
3. Bagi DPRD dapat meningkatkan Jaring Asmara kepada masyarakat, meningkatkan fungsi pengawasan terhadap program-program pembangunan yang telah didanai oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali,
4. Bagi penelitian selanjutnya perlu di kaji lebih mendalam tentang mekanisme musrenbang tingkat desa sampai tingkat kabupaten yang efektif dan efisien.

Daftar pustaka

- Agus Salim. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara wacana..
- Bangun, Andarias. 2009. *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang*. Tesis S2 USU.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 2003.
- Hernanti, Susila. 2013. *Mekanisme Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Di Kalimantan Barat*. *Publika, Jurnal S-1 Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara*, volume 2 nomor 1. <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
- Himawan Indrajat, Budi Hardjo, Ismono Hadi dan Pitojo Budiono, 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Kemiling*. Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dies Natalis FISIP Unila Tahun 2012
- Inta P. N. Danamik dan M. E. Tahitu, 2007. *Studi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Kasus: Masyarakat Desa Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah)*. *Jurnal Agroforestri Volume II Nomor 1*.
- Lubis, Asri. 2009. *Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. *Jurnal Tabularasa PPS UNIMED Vol.6 No.2*.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Rahayu, Sri. 2007. *Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Provinsi Jambi*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 10 Makasar.
- Rahayu, Sri. 2010. *Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Volume 12, Nomor 2, Hal. 29-34*.

Salman, Muhammad. 2008. *Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang*. Tesis S2 USU.

Sanjaya, Wina, 2009. Strategi Pembelajaran Berdasarkan Standar Proses Pendidikan. Group. Santiyasa, I Wayan. 2004. Model.

Satries, Wahyu Ishardino. 2011. *Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010*. Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 2.

Sopanah, 2009. *Menguak Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBD*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 12 Palembang.

Sopanah, 2012. *Ceremonial Budgeting Dalam Perencanaan Penganggaran Daerah: Sebuah Keindahan Yang Menipu*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 15 Banjarmasin.

Wahyuningsih et all. 2012. *Determinan Partisipasi Penganggaran Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas*. Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 9/No.1.

2014. Studi kasus (Online) 27 Juni 2014
http://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus

2014. Pengertian Rembug (Online) 16 November 2014
<http://jogiatrip.com/id/encyclopedia/detail/1237/rembug-desa>

2014. Pengertian Anggaran (Online) 16 November 2014
<http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/07/pengertian-anggaran-secara-umum.html>

2014. Informan Penelitian (Online) 2 September 2014
<http://milmanyusdi.blogspot.com/2009/11/metodologi-penelitian-bab-iii.html>

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali.

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah di Kabupaten Boyolali.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.